

**KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL DIBAWAH  
KEPEMIMPINAN PERDANA MENTERI TONY ABBOTT TAHUN 2013**

**Oleh:  
Ardianti<sup>1</sup>**

**([ardiantiugie89@gmail.com](mailto:ardiantiugie89@gmail.com))**

**Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP. MA**

**Bibliografi : 4 Jurnal, 6 Buku, 13 Internet**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research describes about Australia's policy to control the illegal immigrants in 2013. In particular, this research describes the policies adopted by Prime Minister Tony Abbott. Australia is a country which to be one of the international immigrant. The Increased arrivals of illegal immigrants from year to year make impact to sovereignty and security of Australia region. Therefore, it requires the government to be firm in handling it. The concept that used by author is national interest by Morgenthau, realis approach and securitization theory by Barry Buzan. The theory and concept use to understand the policy of Australian government to protect the sovereignty of Australian territory from the transnational crime. The result of this research is the policies adopted by prime minister Tony Abbott to control the arrival of the illegal immigrants is the policy of Operation Sovereign Borders (OSB). OSB done by placing Australian military in border area to prevent the arrival of illegal immigrants or asylum seeker by boat. OSB policy implementation in the field is to intercept or repatriate back boats carrying asylum seekers to the embarkation country.*

**Keywords:** *Policy, Illegal Immigrant, Asylum Seeker, Operation Sovereign Borders (OSB)*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2008

## Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan kebijakan Australia terkait dengan penanganan imigran ilegal yang datang ke Australia dibawah kepemimpinan perdana menteri Tony Abbott. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Australia dibawah kepemimpinan perdana menteri Tony Abbott dalam menangani kedatangan imigran ilegal yang datang ke Australia fokus imigran ilegal terhadap pencari suaka dan pengungsi.

Australia, sebagaimana negara-negara maju lainnya memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kehidupan bermasyarakat multietnik yang tumbuh di Australia memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi. Selain itu, terdapat kepercayaan diantara para pencari suaka bahwa lebih mudah untuk mendapat status pengungsi di Australia dibandingkan negara lain, dan hal ini membuat mereka berusaha datang ke Australia dengan berbagai cara.

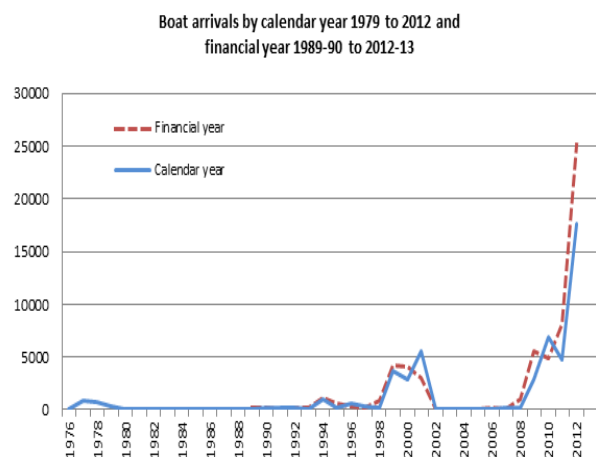
Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Terminologi *boat people* sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau *asylum seeker* yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada diluar teritori negara tersebut.

Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship (DIAC)* memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran

ilegal.<sup>2</sup> Persoalan imigran ilegal yang terus terjadi sangat meresahkan bagi Australia, karena peningkatan terus terjadi dari tahun ketahun khususnya imigran ilegal atau pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia dengan menggunakan perahu.

Berdasarkan data Badan Pengungsi Australia, pada tahun 2004-2005 terdapat 8 perahu dengan 61 imigran. Pada 2008-2009 mulai meningkat menjadi 23 perahu dengan 985 imigran. Pada 2009-2010 ada 117 perahu dengan 4.370 imigran dan 2010-2012 sebanyak 110 perahu dengan 7.983 imigran dan pada tahun 2012-2013 terdapat sebanyak 403 perahu dengan jumlah 25.173 imigran.<sup>3</sup>

### Gambar Grafik kedatangan orang yang tiba secara ilegal dengan perahu 1979-2013



Sumber: Parliamnet Of Australian: Departement of Parliamentary Services. *Statistical Appendix updated 23 July 2013*. Page 26. 2004-2010

<sup>2</sup>Parliament of Australia, tersedia di: [http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05) [diakses pada 15 Januari 2015]

<sup>3</sup>Parliamnet Of Australian: Departement of Parliamentary Services, *Statistical Appendix updated 23 July 2013*, hlm 24-26. Tersedia di: <[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals)> [diakses 17 Januari 2015]

Persoalan imigran yang saat ini terus meningkat dan membutuhkan perhatian serius dan harus menjadi prioritas utama negara mengatasinya, karena tidak sedikit para imigran ilegal melakukan perjalanan laut dari Indonesia ke Australia dengan menggunakan perahu dimana Indonesia menjadi negara transit para imigran ilegal karena letak Indonesia merupakan negara kepulauan dan bertetangga dengan Australia sangat strategis jika dilalui dengan jalur laut.<sup>4</sup> Bagi Australia kehadiran pencari suaka yang terus meningkat tersebut menjadi beban tersendiri bagi kedaulatan serta keamanan di Australia.

Dengan meningkatnya jumlah migrasi maka resiko munculnya penyelundupan orang pun semakin besar. Penyelundupan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang saat ini marak terjadi.<sup>5</sup> Pemerintah Australia menganggap masalah penyelundupan manusia lewat laut ke wilayahnya adalah hal yang menyangkut kedaulatan. Beberapa alasan yang menggambarkan penyelundupan manusia sebagai ancaman utama bagi masyarakat Australia, yaitu antara lain:<sup>6</sup>

1. Adanya persoalan serius terhadap keamanan dan keprihatinan akan adanya tindak kriminal ketika orang-orang yang datang ke Australia tetapi tidak memiliki identifikasi yang jelas.

2. Terdapat resiko karantina terhadap pemeriksaan kesehatan bagi warga biasa yang akan melewati proses imigrasi.
3. Pemrosesan terhadap imigran ilegal menimbulkan masalah biaya dan logistik yang signifikan.
4. Penyeludupan manusia dapat melanggar kedaulatan Australia, sehingga mengganggu kedaulatan negara dalam mengontrol perbatasan negaranya.

Persoalan imigran yang saat ini terus meningkat membutuhkan perhatian serius dan harus menjadi prioritas utama negara mengatasinya. Berbagai kebijakanpun sudah diterapkan dengan tujuan agar dapat mengontrol arus kedatangan imigran ilegal pencari suaka yang datang melalui jalur laut.

Pada masa pemerintahan perdana menteri John Howard, Australia menerapkan kebijakan *Pasifik Solution*, *Operasi Relex*, Pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi. Pemerintahan perdana menteri Kevin Rudd sepenuhnya memberdayakan keberadaan pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas dan memberikan visa permanen. Pada pemerintahan perdana menteri Julia Gillard pemerintah mengumumkan bahwa pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru akan dibuka kembali, pemrosesan imigrasi untuk visa perlindungan akan tertunda untuk jangka waktu sekitar 4-5 tahun.<sup>7</sup>

Meskipun telah diterapkan beberapa kebijakan tersebut belum juga mampu untuk menangani persoalan peningkatan kedatangan para pencari suaka di Australia. Larangan dan sanksi keras yang diterapkan

---

<sup>4</sup>Vivanews, *Indonesia Jadi Tempat Transit Imigran Gelap*, 29 April 2009. <[http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia\\_jadi\\_tempat\\_transit\\_imigran\\_gelap](http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap)> [diakses 10 Januari 2015]

<sup>5</sup>Sartika Soesilowati, *Sekuritisasi "manusia perahu": efektifkah?*, Departemen hubungan internasional, Universitas Airlangga. <<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jgs173964b502full.pdf>> [diakses 15 Januari 2015]

<sup>6</sup>Australian Federal Police (AFP). *People Smuggling*, <http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking/people-smuggling.aspx>, [diakses 20 Februari 2015]

---

<sup>7</sup>Amnesty International, Document-Australia: *This is breaking people: Human rights violations at Australia's asylum seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea*. Tersedia di: <<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409-49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120022013en.html>> [diakses 20 Januari 2015]

Australia sebagai negara tujuan seperti tidak diperdulikan.

Hal ini terbukti dengan jumlah kapal ilegal imigran ilegal dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, imigran ilegal dari negara Timur Tengah seperti Iran, Afganistan dan Pakistan masih terus mengalir.<sup>8</sup>

### ***Labor's record: 48,300 Kapal ilegal yang tiba sejak tahun 2007***



Sumber: *The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy*.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama satu setengah tahun terakhir, tidak kurang dari 19 ribu imigran ilegal tiba di Australia. Oleh karena itu, perdana menteri terpilih tahun 2013 lalu juga berupaya untuk mengatasi masalah ini.

Perdana menteri Tony Abbott tidak dapat menyelesaikan fenomena manusia perahu begitu saja. Hal ini dikarenakan masalah imigran ilegal telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan.

<sup>8</sup>The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy, tersedia di: <<http://www.nationals.org.au/Portals/0/2013/policy/The%20Coalition%E2%80%99s%20Operation%20Sovereign%20Borders%20Policy.pdf>> [diakses 20 Januari 2015]

## **Kerangka Teori**

Tingkat analisa yang digunakan adalah Dalam bukunya ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi Mohtar Mas'ood menjelaskan ada lima tingkat analisa dalam menelaah semua kemungkinan unit analisa yaitu: individu, kelompok, negara bangsa, pengelompokkan negara-negara, dan sistem internasional.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan tingkat analisa Negara-Bangsa, yang berasumsi bahwa semua pembuat keputusan akan bertindak dan mengeluarkan keputusan yang sama bila dihadapkan pada masalah yang sama. Teori yang digunakan penulis dalam menganalisa persoalan imigran ilegal di Australia adalah keamanan dan sekuritisasi menurut Barry Buzan. Berdasarkan pemikiran Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, state, and Fair* mengatakan bahwa :

*"security, in any objective sense, measure the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked."*

Penjelasan Buzan tersebut menyatakan bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Keamanan dalam sistem internasional adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka.

Keamanan secara tradisional dititik beratkan pada kekuatan militer. Konsep keamanan tradisional berpandangan bahwa:

1. Persoalan keamanan tradisional merupakan kasus keamanan dalam arti sempit yang diartikan dalam keamanan negara (*state security*).
2. Sumber-sumber ancaman atau sumber ketidakamanan (*insecurity*) berasal dari ancaman militer, oleh karena itu

<sup>9</sup>Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm, 41-42

mengatasi sumber-sumber ancaman adalah dengan memperkuat kemampuan militer, baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. Negara merupakan aktor utama dalam mendefinisikan konsep keamanan, dan merupakan aktor utama yang menjalankan konsep keamanan tersebut (implementasi).

Sedangkan pemahaman keamanan secara non-tradisional telah menganggap bahwa militer bukanlah satu-satunya aktor dalam keamanan. Bary Buzan dalam bukunya yang berjudul *People State and Fear: an Agenda for international Security Studies in Post Cold War Era*, bahwa keamanan yang dimaksud didalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>10</sup>

Kejahatan yang berasal dari ancaman keamanan non-tradisional sejatinya telah mengancam kelima dimensi keamanan tersebut dan karenanya sudah harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara.

Buzan juga dikenal dengan istilah “*Securitization-nya*” dimana sekuritisasi ini sebagai usaha untuk menjadikan persoalan non-militer seperti ekonomi, lingkungan, bencana, wabah penyakit, pemanasan global sebagai isu keamanan. Perluasan arti ini bertujuan untuk memberi ruang bagi intervensi kekuatan militer pada isu-isu non militer.

Sekuritisasi menurut Buzan, adalah sebuah bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yaitu: *nonpoliticized* yang berarti pemerintah tidak menangani permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan

perdebatan dalam ranah publik. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, *to securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik bisa dianggap sah untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Sekuritisasi berarti bahwa sebuah masalah telah menjadi ancaman terhadap keamanan negara sehingga memerlukan tindakan segera untuk mengatasinya. Masalah imigran ilegal harus diselesaikan karena ini terkait masalah kedaulatan negara dan juga merupakan masalah kemanusiaan, oleh karena itu, negara tujuan para imigran perlu mengatasi masalah ini. Karenanya, menjadi tugas nasional pemerintah Australia guna menjamin tidak akan ada kejadian yang akan memberikan ancaman terhadap keamanan Australia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemerintah Australia menganggap bahwa permasalahan imigran ilegal tersebut sebagai isu yang telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata. Australia merasa terancam keamanannya oleh para pendatang imigran ilegal dan pencari suaka tersebut. Dengan jumlah kedatangan imigran ilegal yang terus meningkat tidak menutup kemungkinan mereka disusupi oleh kegiatan dari kejahatan transnasional seperti *people smuggling*, dan *human trafficking* atau kegiatan kriminal lainnya. Untuk mencegah terjadinya hal negatif yang mengancam kedaulatan negara tersebut, maka penanganan imigran ilegal ini harus dilakukan dengan komprehensif melalui pengamanan disetiap perbatasan wilayah negara Australia.

---

<sup>10</sup>Philips Jusario Vermonte, *Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya*, Jurnal Analisis CSIS Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan, tahun XXXI/2002 No. 1, hlm 46

---

<sup>11</sup>*Ibid*



Perdana menteri Tony Abbott menerapkan kebijakan yang pragmatis dengan menempatkan pengolahan lepas pantai dibawah kepemimpinannya dengan kebijakan “*Operasi Sovereign Borders (OSB)*” atau Operasi Kedaulatan Perbatasan”.<sup>12</sup> Kebijakan ini sebagai strategi pencegahan pencari suaka dalam menghadapi berbagai potensi masuknya para pencari suaka ke negaranya. Tujuannya adalah untuk melemahkan penyelundupan manusia kepada pencari suaka yang mencoba melakukan perjalanan ke Australia.

Kebijakan yang diterapkan oleh perdana menteri Tony Abbott adalah merupakan suatu upaya pemerintah Australia dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Berdasarkan pendapat kaum realis, seorang aktor politik yang rasional adalah orang yang bertindak untuk meningkatkan atau memajukan kepentingannya. Ide dan asumsi dasar kaum realis adalah pandangan pesimis atas sifat manusia, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual yang pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara.

Dalam hal ini Australia akan menggunakan segala daya upayanya untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap apapun yang akan mengancam kepentingan nasionalnya. Karena pemikiran kaum realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan

persaingannya dengan yang lain.<sup>13</sup> Oleh karena itu *Operasi Sovereign Borders* yang didasarkan pada gagasan bahwa Australia sedang mengalami “krisis perbatasan perlindungan” dimana pemerintah Australia menganggap bahwa krisis perbatasan ini sebagai “Keadaan Darurat Nasional” yang harus dilakukan dengan fokus dan sebagai tuntutan darurat.<sup>14</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi Umum Negara Australia

Australia, sebagaimana negara-negara maju lainnya memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Australia juga sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya.

### Imigran Ilegal dan Pencari Suaka Di Australia

*Illegal migration* merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin.<sup>15</sup> Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap, yaitu:<sup>16</sup> Pertama, Orang-orang yang

---

<sup>12</sup>Amnesty International, Document-Australia: *This is breaking people: Human rights violations at Australia's asylum seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea.* <<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409-49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120022013en.html>> [diakses 20 Januari 2015]

---

<sup>13</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. Hlm, 88

<sup>14</sup>The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy July 2013, <<http://www.nationals.org.au/Portals/0/2013/policy/The%20Coalition%E2%80%99s%20Operation%20Sovereign%20Borders%20Policy.pdf>> [diakses 20 Januari 2015]

<sup>15</sup>Ramadhan, K.H dan Yusra Abrar, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, hlm 12

<sup>16</sup>*ibid*, hlm 13

melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi), kedua orang-orang yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal. Ketiga orang yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.<sup>17</sup> Kedatangan pencari suaka ke Australia dengan perahu telah menjadi isu utama dalam politik Australia sejak tahun 1970-an. Pencari suaka atau manusia perahu pertama yang tiba di pantai utara Australia berasal dari Vietnam.<sup>18</sup> Ketika itu, lima orang asal Vietnam Selatan dalam sebuah kapal bocor tak sengaja mengubah tujuan mereka ke Darwin. Awalnya, kelima pencari suaka asal Vietnam Selatan berada dalam sebuah kapal bocor yang hendak berlayar ke Guam, lautan Pasifik. Mereka meninggalkan negara setelah perang Vietnam. Di tengah laut Borneo, mereka bertemu seorang pelaut Australia yang mengatakan bahwa negaranya adalah sebuah “negara besar” dan “ramah”. Kelima orang tersebut akhirnya berlayar menuju pelabuhan Darwin.

---

<sup>17</sup>JRS INDONESIA, *Pengungsi*, tersedia di: <<http://jrs.or.id/refugee/>> [diakses 20 Februari 2015]

<sup>18</sup>Phillips, J & Spinks, H, *Boat arrivals in Australia since 1976*, 2011, tersedia di <[http://www.aph.gov.au/about\\_parliament/parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubsBN/2011-2012/boatarrivals](http://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubsBN/2011-2012/boatarrivals)> [diakses 20 februari 2015]

Kisah pencari suaka atau manusia perahu yang terjadi sekitar tiga abad silam ini seolah-olah tidak pernah berhenti hingga abad moderen ini. Sejak tahun 1970-an sampai sekarang benua Australia masih menjadi magnet bagi para manusia perahu dengan motif yang beragam. Australia telah menjadi negara yang paling banyak didatangi oleh para migran dengan berbagai alasan, ada yang datang karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik ada juga yang datang karena akibat dari kondisi perang atau konflik dinegara asal sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya dan menetap di Australia.

Sampai saat ini, kedatangan imigran ilegal atau pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah seperti Iran, Afganistan, dan Pakistan terus mengalir. Pada awalnya pemerintah Australia membuka pintu seluas-luasnya bagi para imigran dengan harapan akan memberikan efek positif yaitu menjadi kekuatan untuk membangun Australia. Namun, dalam perkembangannya, bukan hanya para imigran resmi dengan berbagai kelengkapan dokumen yang menjadikan Australia sebagai tempat tujuan, imigran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah maupun memiliki kelengkapan dokumen tetapi palsu marak datang ke Australia dengan alasan mencari suaka. Kebanyakan dari imigran yang masuk malah membawa masalah baru bagi Australia. Keterbatasan berbahasa, perbedaan kultur, kemampuan ala kadarnya dari para imigran hanya mempersulit keadaan di Australia.

Jumlah masuknya yang selalu meningkat setiap tahunnya membuat Australia menjadikan pengungsi sebagai salah satu masalah yang diprioritaskan. Diperkirakan tidak kurang dari 3.000 orang manusia perahu berusaha untuk mencapai pantai Australia setiap bulan, pada tahun 2013.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Sartika Soesilowati, *Sekuritisasi “manusia perahu”: efektifkah?”*, Jurnal Global dan Strategis:

**Tabel Jumlah orang yang tiba secara ilegal dengan perahu sejak 1976-2013**

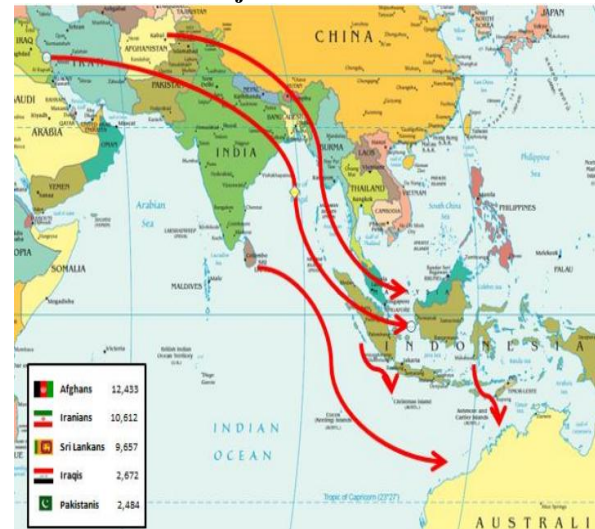
Year	Number of boats	Number of people	
1975–76	1	5	
1976–77	7	204	
1977–78	43	1423	
1978–79	6	351	
1979–80	2	56	
1980–81	1	30	
1981–82 to 1988–89	0	0	
1989–90	3	224	
1990–91	5	158	
1991–92	3	78	
1992–93	4	194	
1993–94	6	194	
1994–95	21	1071	
1995–96	14	589	
1996–97	13	365	
1997–98	13	157	
1998–99	42	921	
1999–00	75	4175	
2000–01	54	4137	
2001–02	19	3039	
2002–03	0	0	
2003–04	3	82	
2004–05	0	0	
2005–06	8	61	
2006–07	4	133	
2007–08	3	25	
Year	Number of boats*	Number of people (excludes crew)*	Number of people (includes crew)**
2008–09	23	985	1033
2009–10	117	5327	5609
2010–11	89	4730	4940
Year	Number of boats	Crew	Number of people (excludes crew)
2011–12	110	190	7983
2012–13	403	423	25 173

Sumber: *Boat arrivals in Australia since 1976*

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Vol. 8/ No.1/September 2014

Hingga saat ini, imigran ilegal dari negara Timur Tengah seperti Iran, Afghanistan dan Pakistan masih terus mengalir.<sup>20</sup>

**Gambar Labor's record: 48,300 Kapal ilegal yang tiba sejak tahun 2007**



Sumber: *The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy*.

Kekhawatiran negara terhadap imigran gelap ini adalah adanya praktek-praktek kejahatan lintas negara seperti praktek-praktek penyelundupan manusia (*human smuggling*) maupun perdagangan manusia (*human trafficking*) yang semua ini dilakukan dengan dalih mereka adalah pencari suaka. Praktek imigran gelap dan penyelundupan manusia ini merupakan kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara.

Berbagai kebijakanpun sudah diterapkan dengan tujuan agar dapat mengontrol arus kedatangan imigran ilegal

<sup>20</sup>The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy, tersedia di: <<http://www.nationals.org.au/Portals/0/2013/policy/The%20Coalition%E2%80%99s%20Operation%20Sovereign%20Borders%20Policy.pdf>> [diakses 20 Januari 2015]



ilegal pencari suaka yang datang melalui jalur laut.

Pada masa pemerintahan perdana menteri John Howard, Australia menerapkan kebijakan *Pasifik Solution*, *Operasi Relex*, Pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi. Pemerintahan perdana menteri Kevin Rudd sepenuhnya memberdayakan keberadaan pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas dan memberikan visa permanen. Pada pemerintahan perdana menteri Julia Gillard pemerintah mengumumkan bahwa pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru akan dibuka kembali, pemrosesan imigrasi untuk visa perlindungan akan tertunda untuk jangka waktu sekitar 4-5 tahun.<sup>21</sup>

Meskipun telah diterapkan beberapa kebijakan tersebut belum juga mampu untuk menangani persoalan peningkatan kedatangan para pencari suaka tersebut. Oleh karena itu, menyangkut pengungsi pencari suaka ke Australia, perdana menteri Tony Abbott mengambil langkah tegas untuk mengatasinya. Kebijakan yang diterapkan oleh Tony Abbott adalah dengan *Operation Sovereign Borders (OSB)* yaitu merupakan operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer, serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal.

Gagasannya untuk mengurangi jumlah imigran yang masuk ke Australia dengan menggunakan perahu berhasil membantu Abbott mengakhiri kekuasaan partai Buruh selama enam tahun terakhir.

---

<sup>21</sup>Amnesty International, Document-Australia: *This is breaking people: Human rights violations at Australia's asylum seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea*. Tersedia di: <<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409-49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120022013en.html>> [diakses 20 Januari 2015]

## **Kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasan (*Operation Sovereign Borders Policy/OSB*)**

*Operation Sovereign Borders (OSB)* adalah operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer, serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal.<sup>22</sup> Diluncurkan pada 18 September 2013 pemerintahan koalisi membentuk militer sebagai respon untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia dan mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka dilautan dan menjaga integritas program migrasi Australia.<sup>23</sup> Pemerintah Koalisi memperlakukan krisis perlindungan perbatasan sebagai darurat nasional dan mengatasi dengan fokus bahwa sebagai tuntutan darurat.

Dalam *Operation Sovereign Borders* telah dibentuk Gugus Tugas Lembaga Bersama atau *Joint Agency Task Force (JATF)* untuk memastikan upaya seluruh pemerintah untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. JATF ini didukung oleh tiga kelompok tugas operasional:<sup>24</sup>

1. Kelompok Tugas Gangguan dan Pencegahan yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia.
2. Kelompok Tugas Deteksi, *Interception* dan Transfer yang dipimpin oleh Bea Cukai Australia dan Layanan Perlindungan Perbatasan yang meliputi Komando Perlindungan Perbatasan.
3. Kelompok Tugas Penahanan Lepas Pantai dan Pengembalian yang dipimpin

---

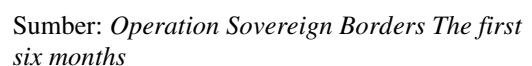
<sup>22</sup>Australian Government: Australia Customs and Border Protection Service, *Operation Sovereign Borders*, tersedia di: <http://www.customs.gov.au/site/operation-sovereign-borders.asp> [diakses 20 Januari 2015]

<sup>23</sup>Lembar fakta operasi perbatasan berdaulat, tersedia di: [www.customs.gov.au/site/Translations/.../Fact-Sheet-Indonesian.PDF](http://www.customs.gov.au/site/Translations/.../Fact-Sheet-Indonesian.PDF) [diakses 20 Februari 2015]

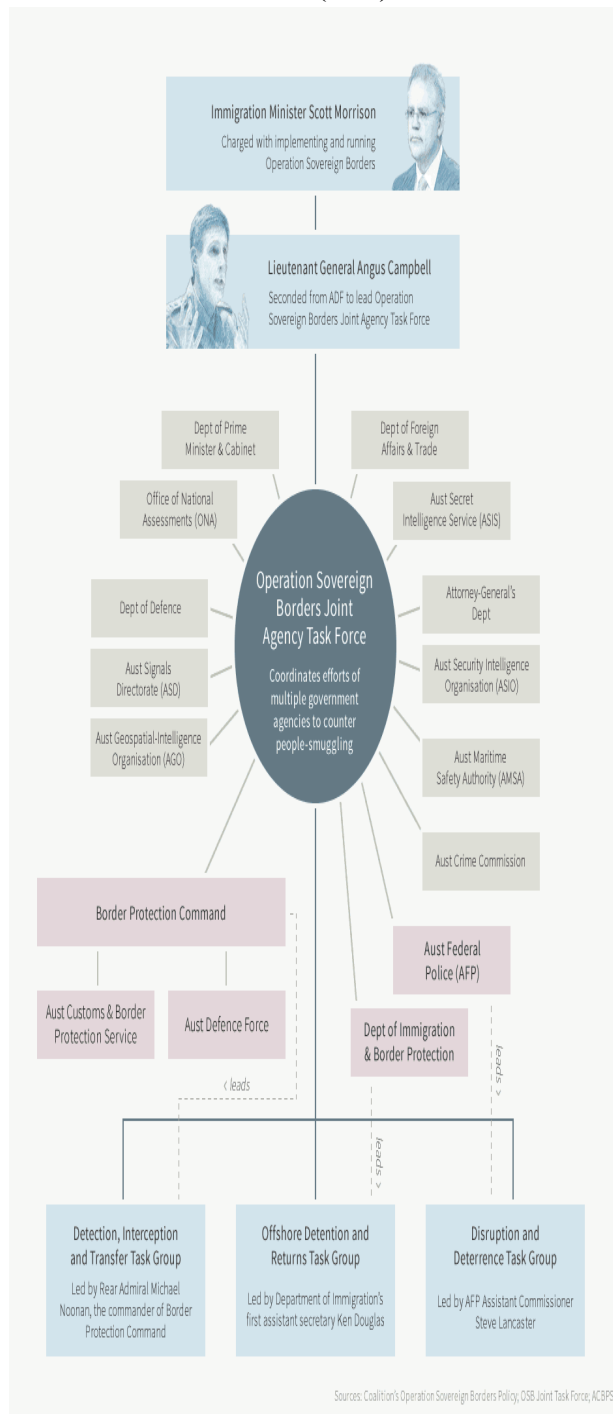
<sup>24</sup>Australian Government, *op. cit.*,

Di bawah *Operasi Sovereign Borders*, Tony Abbott melakukan tindakan bersama Menteri Imigrasi Scott Morrison dengan membuat Operasi Kedaulatan Perbatasan Negara, yang dipimpin Angus Campbell. Angus Campbell adalah seorang komandan militer senior bintang 3. Komandan akan melaporkan langsung kepada Menteri Imigrasi, yang akan memiliki tanggung jawab portofolio untuk *Operasi Sovereign Borders*. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan batas negara untuk menghentikan perahu-perahu penyelundup, mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka di lautan, dan menjaga integritas program imigrasi Australia.

### Struktur Organisasi *Operation Sovereign Border's Policy (OSB)*



**Gambar Struktur Organisasi Operation Sovereign Border's (OSB)**



Sumber: *Operation Sovereign Borders The first six months*  
<http://www.abc.net.au/news/interactives/operation-sovereign-borders-the-first-6-months/>

Berdasarkan tabel diatas *The OSB Joint Agency Task Force (JATF)* telah dibentuk untuk memastikan seluruh upaya pemerintah untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Dalam pelaksanaan Operasi Kedaulatan Tony Abbott menjadikan Menteri Imigrasi Australia sebagai penanggung jawab dan Angkatan Laut Australia sebagai pelaksana pengamanan perbatasan laut.

Pada 19 September 2013, Letnan Jenderal Campbell ditunjuk untuk memimpin *Operasi Sovereign Borders*.<sup>25</sup> Bintang tiga Letnan Jenderal Angus Campbell telah ditunjuk ke Imigrasi untuk mengawasi jalannya *Operasi Sovereign Borders* Bersama Badan Task Force, yang secara resmi didefinisikan sebagai “operasi keamanan perbatasan militer yang dipimpin didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal”. Mayor Jenderal Campbell akan mengkoordinasikan 16 departemen dan lembaga yang akan datang di bawah kebijakan *Operasi Sovereign Borders*. *Sovereign Borders* adalah operasi penegakan hukum sipil, tetapi dalam menerapkan strategi untuk menghentikan kedatangan perahu, Pemerintah telah semakin mengadopsi struktur militer.

Operasi Kedaulatan Perbatasan adalah inisiatif Pemerintah Australia dalam mengamankan batas negara yang dipimpin oleh militer untuk menghentikan perahu-perahu penyelundup, mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka di lautan, dan menjaga integritas program imigrasi Australia. Operasi Kedaulatan Perbatasan sendiri dibuat dengan beberapa alasan, antara lain adalah Penanggulangan kejahatan lintas negara dan besarnya biaya dalam penanganan pengung siserta untuk

<sup>25</sup>Australia Government, *First 100 days Government*, tersedia di:  
[https://www.pm.gov.au/sites/default/files/reports/first\\_100\\_days\\_of\\_government.pdf](https://www.pm.gov.au/sites/default/files/reports/first_100_days_of_government.pdf) [diakss 15 Mei 2015]

melindungi perbatasan Australia. Bagian dari OSB ini adalah dengan melibatkan negara ketiga untuk pengolahan lepas pantai di Pulau Nauru di Pasifik atau Papua Nugini bagi semua pencari suaka yang tiba dengan perahu ke wilayah Australia untuk pemrosesan imigrasi.<sup>26</sup>

Pemerintahan Tony Abbott juga memberlakukan kembali Visa Perlindungan Sementara (TPV) pada 18 Oktober 2013 untuk pengungsi sudah di Australia, sebagai salah satu unsur kebijakan mereka untuk menghentikan kedatangan kapal pencari suaka. Mereka menggunakan visa perlindungan sementara dan bisa bebas dari pusat penahanan. Pengungsi yang diberi visa sementara tidak bisa mendapatkan status penduduk permanen (*permanent residency*).<sup>27</sup>

### **Respon Dunia Internasional terhadap kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB)**

Pelaksanaan Operasi Kedaulatan Perbatasan mendapat respon negatif dari berbagai pihak, antara lain Indonesia dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Bahkan, PBB pun juga mengecam melalui Komisioner PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan keras dan tegas itu menimbulkan kesan pemerintahan Abbott tidak mau peduli terhadap pemasalahan

tersebut secara menyeluruh. Dengan kata lain, Australia dibawah Abbott cenderung lebih mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan tidak mau mempedulikan kepentingan negara tetangga lainnya. Meskipun mendapat respon negatif dari dunia internasional pemerintah Australia tetap menjalankan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB), karena bagi Australia kebijakan tersebut adalah upaya untuk melindungi kedaulatan suatu negara.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa data bagaimanakah bentuk kebijakan Australia dalam menangani kedatangan imigran ilegal dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott tahun 2013. Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi dan sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship (DIAC)* memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal.

Persoalan imigran ilegal yang terus terjadi sangat meresahkan bagi Australia, karena peningkatan terus terjadi dari tahun ketahun khususnya imigran ilegal atau pencari suaka yang mencoba masuk ke

---

<sup>26</sup>Sally Watson, *Perjuangan Lanjutan Australia dengan Pencari Suaka yang Tiba oleh perahu - Bagaimana Konsisten adalah Pendekatan Kebijakan sekarang dengan International Australia Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Kemanusiaan?*, 2014, Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No 2, pp. 17-32

<sup>27</sup>Republika, *Australia Berlakukan Lagi Visa Sementara untuk Pengungsi dan Pencari Suaka*, [berita 05 Desember 2014, tersedia di: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/05/ng40gh-australia-berlakukan-lagi-visa- sementara-untuk-pengungsi-dan-pencari-suaka> [diakses 10 Mei 2015]

Australia dengan menggunakan perahu. Persoalan imigran yang saat ini terus meningkat dan membutuhkan perhatian serius dan harus menjadi prioritas utama negara mengatasinya. Dengan meningkatnya jumlah migrasi maka resiko munculnya penyeludupan orang pun semakin besar. Pemerintah Australia menganggap masalah penyelundupan manusia lewat laut ke wilayahnya adalah hal yang menyangkut kedaulatan.

Dalam menghadapi arus kedatangan manusia perahu, pemerintah Australia membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk para imigran yang dianggap ilegal tersebut. Sebelumnya kebijakan untuk mengurangi kedatangan jumlah imigran ilegal ini telah diterapkan oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa sebelum perdana menteri Tony Abbott, namun kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan terlebih dahulu belum juga mampu mengatasi masalah tersebut. Hal inilah yang mengharuskan perdana menteri Tony Abbott mengambil langkah tegas untuk mengatasinya.

Perdana menteri Tony Abbott mengambil kebijakan melakukan penghalauan terhadap kapal-kapal pengungsi pencari suaka ke Australia, kebijakan tersebut dikenal sebagai *Operation Sovereign Border's* (OSB). *Operation Sovereign Borders* atau Operasi kedaulatan perbatasan adalah operasi keamanan batas negara pemerintah Australia yang dipimpin oleh lembaga militer untuk menghentikan perahu-perahu penyeludup, mencegah orang-orang membahayakan nyawa mereka dilautan dan menjaga integritas program migrasi Australia. Dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Australia dalam membuat kebijakan pengusiran terhadap para pencari suaka adalah dengan membuat kebijakan perlindungan perbatasan Australia yang disebut *Operation Sovereign Borders* (OSB) atau Operasi Perbatasan Kedaulatan.

Pemerintah Australia dalam menjalankan kebijakan ini memiliki dua alasan, yaitu: Pertama, penanggulangan kejahatan lintas negara Australia menyadari bahwa besarnya jumlah arus perpindahan manusia yang masuk ke Australia juga diiringi bertambahnya jumlah kejahatan-kejahatan lintas negara, seperti *human trafficking* (perdagangan manusia) dan *human smuggling* (penyelundupan manusia). Kedua, besarnya biaya dalam penanganan pengungsi Australia sebagai salah satu negara tujuan favorit pencari suaka mengakibatkan jumlah pencari suaka maupun pengungsi yang masuk selalu meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah Australia merasa bahwa pencegahan masuknya perahu ilegal akan lebih efektif untuk mengurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Menurut perdana menteri Tony Abbott tiga hal yang diperlukan untuk menghentikan gelombang pengungsi, yakni pertama, menempatkan mereka di kamp lepas pantai, kedua, memulangkan kapal perahu penari suaka ke wilayah asal mereka bertolak dan, memberi mereka visa perlindungan sementara.

Implementasi kebijakan OSB di lapangan di antaranya adalah dengan mencegat atau memulangkan kembali kapal-kapal yang membawa pencari suaka ke negara embarkasi. Kebijakan antara Australia melalui *Operation Sovereign Border's* dalam menghadapi ancaman imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran berhasil dengan baik yang ditunjukkan dengan penurunan kedatangan imigran ilegal.

Namun, dalam pelaksanaannya tersebut Operasi Kedaulatan Perbatasan mendapat respon negatif dari berbagai pihak, antara lain Indonesia dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).



## Referensi

### Jurnal

Philips Jusario Vermonte. 2001. *Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya*. Dalam Jurnal: Analisis CSIS Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan, tahun XXXI/2002 No. 1

Sartika Soesilowati. 2014. *Sekuritisasi "manusia perahu": efektifkah?"*. Dalam Jurnal Global dan Strategis: Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Vol. 8/No.1/September 2014

Sita Hidriyah. 2013. *Isu Imigran Gelap dalam Hubungan Bilateral Australia-Indonesia*. Dalam Info Singkat Hubungan Internasional Vol. V. No 19/I/P3D1/Okttober/2013

Watson Sally. 2014. *Perjuangan Lanjutan Australia dengan Pencari Suaka yang Tiba oleh perahu Bagaimana Konsisten adalah Pendekatan Kebijakan sekarang dengan International Australia Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Kemanusiaan*. Dalam Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No 2

### Buku

Buzan, Barry Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. *A New Framework of Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher

Georg Sorensen dan Robert Jackson. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hamid, Zulkifli. 1999. *Sistem Politik Australia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Holsti, KJ. 1995. *International Politics: A Frameworks for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall

Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Pengantar dan Metodolog*. Jakarta: LP3ES

Yusra Abrar dan Ramadhan, K.H. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI

### Internet

Australian Federal Police (AFP). *People Smuggling*, <http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking/people-smuggling.aspx>, [diakses 20 Februari 2015]

Amnesty International, Document-Australia: *This is breaking people: Human rights violations at Australia's asylum seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea*. Tersedia di: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409-49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120022013en.html> [diakses 20 Januari 2015]

———. Document-Australia: *This is breaking people: Human rights violations at Australia's asylum seeker processing centre on Manus Island, Papua New Guinea*. Tersedia di: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409-49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120022013en.html> [diakses 20 Januari 2015]

Australia Government, *First 100 days Government*, tersedia di: [https://www.pm.gov.au/sites/default/files/reports/first\\_100\\_days\\_of\\_government.pdf](https://www.pm.gov.au/sites/default/files/reports/first_100_days_of_government.pdf) [diakss 15 Mei 2015]

—Australia Customs and Border Protection Service, *Operation Sovereign Borders*, tersedia di: <http://www.customs.gov.au/site/operation-sovereign-borders.asp> [diakses 20 Januari 2015]

JRS INDONESIA, *Pengungsi*, tersedia di: <http://jrs.or.id/refugee/> [diakses 20 Februari 2015]

Lembar fakta operasi perbatasan berdaulat, tersedia di: [www.customs.gov.au/site/Translations/.../Fact-Sheet-Indonesian.PDF](http://www.customs.gov.au/site/Translations/.../Fact-Sheet-Indonesian.PDF) [diakses 20 Februari 2015]

Media release, *Operations Sovereign Borders*, tersedia di: <http://www.liberal.org.au/latest-news/2013/07/26/operation-sovereign-borders> [diakses pada 05 Februari 2015]

Parliament of Australia, tersedia di: [http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP05) [diakses pada 15 Januari 2015]

—Departement of Parliamentary Services, *Statistical Appendix updated 23 July 2013*, hlm 24-26. Tersedia di: [http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals) [diakses 17 Januari 2015]

Republika, *Australia Berlakukan Lagi Visa Sementara untuk Pengungsi dan Pencari Suaka*, [berita 05 Desember 2014, tersedia di: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/05/ng40gh-australia-berlakukan-lagi-visa-sementara-untuk-pengungsi-dan-pencari-suaka> [diakses 10 Mei 2015]

The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy, tersedia di: <http://www.nationals.org.au/Portals/0/2013/policy/The%20Coalition%E2%80%99s%20Operation%20Sovereign%20Borders%20Policy.pdf> [diakses 20 Januari 2015]

Vivanews, *Indonesia Jadi Tempat Transit Imigran Gelap*, 29 April 2009. [http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia\\_jadi\\_tempat\\_transit\\_imigran\\_gelap](http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap) [diakses 10 Januari 2015]